

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 1 Vol. III. Januari 2018

Stunting
Mengancam
Bonus
Demografi? p. 03

Fenomena
Dana Bansos
dan Hibah Di
Tahun Politik

p. 9

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



9 772502 868006

Update APBN *p.2*

Perkembangan Ekspor
Impor Indonesia Tahun
2017

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Adhi Prasetyo S. W.
Rendy Alvaro

Editor

Dahiri
Marihot Nasution

Kritik/
Saran



puskajianggaran@dpr.go.id

Stunting Mengancam Bonus Demografi? *p.3*

PEMULIHAN serta perbaikan perekonomian global memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi yang secara umum diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2018, tingkat inflasi yang terkendali dan sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2017 dan 2018, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola nilai mata uang asing (kurs) yang diproyeksikan terkendali. Tercapainya proyeksi tersebut tentunya sangat bergantung pada faktor global dan faktor internal.

Fenomena Dana Bansos dan Hibah Di Tahun Politik *p.9*

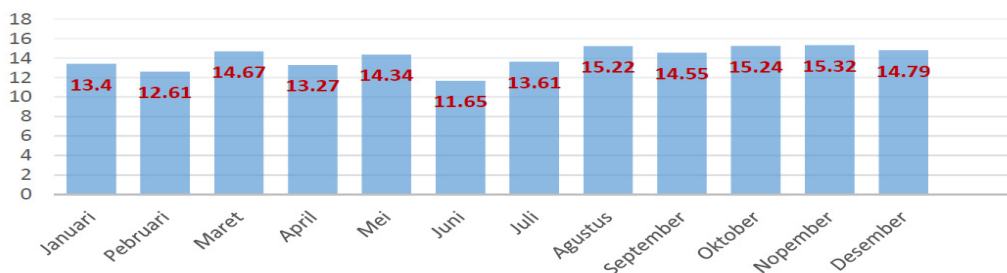
PENYIMPANGAN terhadap dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kerap terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dari temuan BPK terhadap penyimpangan kedua anggaran tersebut yang selalu terjadi hampir setiap tahun. Bahkan kedua anggaran ini kerap dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mempertahankan kekuasaannya menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dari anggaran dana bansos dan hibah yang meningkat menjelang pesta demokrasi tersebut.

Update APBN

Perkembangan Ekspor Impor Indonesia Tahun 2017

Nilai ekspor Indonesia Desember 2017 mencapai USD14,79 miliar atau menurun 3,45 persen dibanding ekspor November 2017 yaitu sebesar USD15,32 miliar. Sementara dibanding Desember 2016 meningkat 6,93 persen. Untuk ekspor nonmigas Desember 2017 mencapai US\$13,28 miliar, turun 5,41 persen dibanding November 2017, sementara dibanding ekspor nonmigas Desember 2016 naik 5,56 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2017 mencapai US\$168,73 miliar atau meningkat 16,22 persen dibanding periode yang sama tahun 2016, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US\$152,99 miliar atau meningkat 15,83 persen.

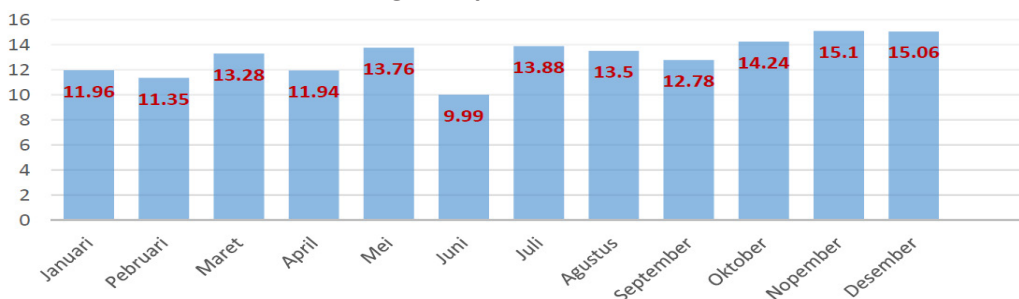
Perkembangan Ekspor Indonesia Tahun 2017



Sumber: BPS, 2018 (Data diolah)

Nilai impor Indonesia Desember 2017 mencapai US\$15,06 miliar atau turun 0,29 persen dibanding November 2017 yaitu sebesar USD 15,1 miliar demikian pula jika dibandingkan Desember 2016 meningkat 17,83 persen. Impor nonmigas Desember 2017 mencapai US\$12,51 miliar atau turun 3,05 persen dibanding November 2017 demikian pula jika dibanding Desember 2016 meningkat 12,87 persen. Untuk impor migas Desember 2017 mencapai US\$2,55 miliar atau naik 15,89 persen dibanding November 2017 dan juga meningkat 50,10 persen dibanding Desember 2016.

Perkembangan Impor Indonesia Tahun 2017



Sumber: BPS, 2018 (Data diolah)

Stunting Mengancam Bonus Demografi?

oleh
Ade Nurul Aida*)

Abstrak

Saat ini Indonesia memiliki peluang bonus demografi pada rentang tahun 2028-2031, dimana usia produktif lebih besar dari usia non produktif, serta tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif cenderung rendah. Namun sayangnya, masih tingginya angka balita yang mengalami stunting atau tinggi badan rendah (pendek) bisa mengancam peluang tersebut. Data Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016 menyebutkan jumlah balita stunting tergolong kronis, yakni mencapai 27,5 persen. Angka tersebut melampaui batas yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Selain berdampak pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri, stunting nyatanya memiliki dampak dalam berbagai bidang lainnya. Untuk itu, intervensi pemerintah amat diperlukan dalam mengatasi permasalahan stunting dalam menyiapkan kualitas SDM yang mumpuni demi menghadapi peluang bonus demografi yang telah di depan mata. Beberapa intervensi diantaranya yaitu komitmen dari pimpinan negara; integrasi, sinkronisasi dan penguatan kerjasama antara program dan lintas sektor; sosialisasi dan edukasi terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi; serta pembangunan akses pangan, gizi dan infrastruktur.

Melimpahnya Proporsi Penduduk Usia Produktif

Struktur penduduk Indonesia senantiasa mengalami perubahan, dimana saat ini proporsi penduduk usia produktif (0-14 tahun) sudah lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (65 tahun ke atas). Berdasarkan fenomena tersebut, Indonesia akan memiliki peluang bonus demografi pada rentang tahun 2028-2031 (proporsi usia produktif berada pada kisaran 68 persen). Dimana pada fase tersebut, tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif cenderung rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), *dependency ratio* Indonesia tahun 2010 sebesar 50,5 persen. Sementara pada tahun 2015 *dependency ratio* memiliki angka lebih kecil yaitu 48,6 persen. Kecenderungan *dependency ratio* yang semakin kecil ini akan berlanjut hingga tahun 2030 yakni sebesar

46,9 persen dan menciptakan bonus demografi bagi Indonesia (gambar 1).

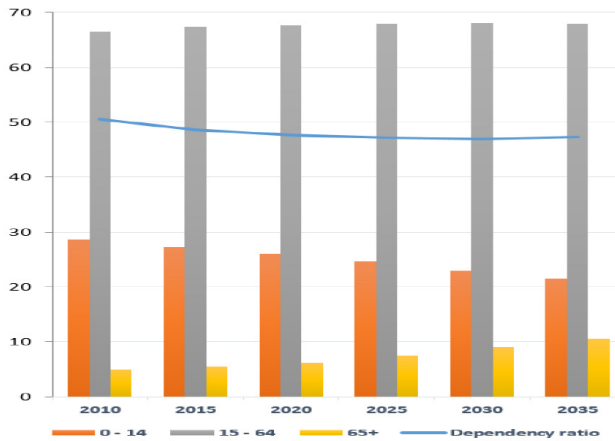
Bonus demografi ini penting bagi Indonesia, karena berpotensi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kondisi ini pun memberi peluang kepada Indonesia menjadi negara produktif yang memiliki jumlah tenaga kerja berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tentu tak akan berarti jika kualitas sumber daya manusia yang ada tak mumpuni. Untuk itu, kualitas kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang perlu ditingkatkan untuk menyambut bonus demografi dalam menjadikan tenaga kerja yang berkualitas.

Prevalensi Stunting yang Masih Tinggi

Buruknya status gizi saat berusia balita dapat menghambat upaya Indonesia meraih bonus demografi dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com*

Gambar 1. Proyeksi Proporsi Penduduk 2010-2035 (Persen)



Sumber: Bappenas, BPS, United Nation Population Fund (UNPF)

Status gizi merupakan cerminan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi yang diterima oleh tubuh dan mengindikasikan apakah balita tersebut menderita kekurangan energi protein (KEP). Status gizi yang diukur berdasarkan rasio Berat Badan/Umur (BB/U) menggambarkan keadaan masa sekarang karena merupakan *outcome* saat ini. Sedangkan yang diukur berdasarkan Tinggi Badan/Umur (TB/U) menggambarkan keadaan masa lampau karena merupakan akumulasi status gizi sejak lahir sampai sekarang. Berat badan kurang (*wasting*) hanya bersifat akut dan tinggi badan yang rendah atau pendek (*stunting*) bersifat kronik. Karena masalah gizi dapat terjadi di semua periode atau siklus kehidupan dan masalah gizi yang terjadi di salah satu siklus akan mempengaruhi atau mengakibatkan masalah gizi yang lain di siklus selanjutnya, maka dari itu sangat perlu mempersiapkan gizi yang baik demi kualitas hidup yang lebih baik (Muqni, 2012).

Seperti yang diketahui, Indonesia saat ini masih berkuat dalam masalah status gizi *stunting*. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016, prevalensi *stunting* Indonesia mencapai 27,5 persen (sangat pendek 8,5 persen dan pendek 19 persen). Menurut WHO, masalah kesehatan

masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi *stunting* lebih dari 20 persen. Hal ini pun menunjukkan bahwa secara nasional masalah *stunting* di Indonesia tergolong kronis. Sulawesi Barat merupakan salah satu dari 14 provinsi yang memiliki angka prevalensinya melebihi angka nasional, bahkan menempatkan Sulawesi Barat sebagai provinsi yang memiliki angka prevalensi tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 37,2 persen. Sementara dibandingkan beberapa negara tetangga, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara Vietnam (19,4 persen), Malaysia (17,2 persen), maupun Thailand (16,3 persen).

Stunting sendiri merupakan masalah gizi kronis yang terjadi dalam waktu lama serta ditandai dengan tinggi badan rendah. Menurut UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Terjadinya *stunting* pada balita seringkali tidak disadari. Biasanya *stunting* banyak diketahui oleh orang tua/keluarga ketika balita berusia dua tahun ke atas. Dimana tinggi badan balita tersebut berada di bawah normal.

Gambar 2. Prevalensi Balita Stunting di Indonesia (Persen)



Sumber: Katadata, 2017

Penyebab *stunting* yaitu rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab *stunting*. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi. *Stunting* diidentikkan dengan kondisi kemiskinan, namun pada kenyataannya *stunting* tidak hanya menimpa kalangan masyarakat bawah. Bahkan, 26 persen orang kaya juga mengalami kondisi kekurangan gizi kronis atau *stunting*. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi. Ini pun membuktikan bahwa kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal penting yang memengaruhi keadaan seseorang di luar dari keadaan status sosial orang tersebut.

Bonus atau Beban Demografi?

Berdasarkan Laporan *Human Development Report 2016*, IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110

di 2014 dari 188 negara, sedangkan Tingkat Kecerdasan anak Indonesia dalam bidang membaca, matematika, dan sains berada di posisi 64 dari 65 negara (OECD PISA, 2012), dan anak Indonesia tertinggal jauh dari anak Singapura (posisi 2), Vietnam (posisi 17), Thailand (posisi 50) dan Malaysia (posisi 52). Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini karena kondisi gizi kronis yang menghasilkan kondisi gagal tumbuh dari balita (*stunting*) (Ulum, 2017).

Penderita *stunting* umumnya memiliki tingkat kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal dan perkembangan fisik terhambat. Efek jangka menengahnya yaitu menurunnya produktivitas dan daya saing di usia dewasa, serta jangka panjangnya adalah rentan terhadap penyakit dan gangguan metabolik. Menurut Prof. Dr. Endang Achadi, masalah *stunting* sebenarnya bukan hanya terkait masalah tinggi badan yang rendah. Proses-proses lain di dalam tubuh juga terhambat, seperti pertumbuhan otak yang berdampak pada kecerdasan.

Dampak dari *stunting* tidak hanya dialami oleh individu itu sendiri.

Tabel 1. Performa dalam Matematika, Membaca, dan Sains

	Mean Score in PISA 2012			Rank
	Mathematics	Reading	Science	
OECD Average	494	496	501	
Singapura	613	570	551	2
Vietnam	511	508	528	17
Thailand	427	441	445	50
Malaysia	421	398	420	52
Indonesia	375	396	382	64
Peru	368	384	373	65

Sumber : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Kondisi tersebut tentunya akan memberikan efek berantai ke berbagai bidang kehidupan manusia baik kehidupan ekonomi, pendidikan maupun kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, tingginya prevalensi *stunting* menyebabkan menurunnya tingkat kognitif anak. Penurunan tingkat kognitif anak penderita *stunting* mengakibatkan penurunan intelegensia (IQ) sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah (pendidikan rendah). Dengan pendidikan yang rendah bila mencari pekerjaan, peluang gagal tes dalam pekerjaan menjadi besar dan tidak mendapat pekerjaan yang baik, yang berakibat pada berkurangnya tingkat pendapatan (*economic productivity hypothesis*)¹ akibat ketimpangan antara standar kualifikasi yang dibutuhkan dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai. Dengan tingkat penghasilan rendah tentunya

tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan sebagaimana mestinya, dampak lanjutannya yaitu kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi, dan banyaknya penderita *stunting* yang rentan terhadap penyakit berdampak pula pada pengeluaran pemerintah, khususnya terkait dengan alokasi jaminan kesehatan nasional yang meningkat pula. Bahkan, kerugian ekonomi akibat *stunting* mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp300 triliun per tahun bagi Indonesia (Gizi Tinggi Prestasi, 2016).

Melihat kondisi tersebut, tentu akan sangat memengaruhi mutu sumber daya dalam menghadapi bonus demografi. Padahal untuk meraih keberhasilan bonus demografi, dibutuhkan tenaga kerja produktif yang bermutu dan berkualitas. Jika SDM tidak mumpuni dan berkualitas, justru bukannya bonus demografi yang didapat, melainkan beban demografi.

Rekomendasi

Stunting masih menjadi tantangan pemerintah di bidang kesehatan pada 2018. *Stunting* atau tinggi badan di bawah standar pada umur tertentu, yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama merupakan salah satu parameter penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam The Copenhagen Consensus 2012, dimana para ahli dalam panel tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan

1) Dimana penghasilan anak *stunting* dan anak normal ketika dewasa akan berbeda 20 persen (Gizi Tinggi Prestasi, 2016)

dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun. Dengan menginvestasi USD1 pada gizi dapat memberikan hasil USD30 dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Pemerintah sendiri saat ini mengalokasikan anggaran terkait penanganan *stunting* sebesar Rp49,7 triliun (Kemenkeu, 2018). Dengan investasi dan alokasi tersebut, diharapkan mampu menekan angka prevalensi dan memberikan peningkatan kualitas di berbagai bidang khususnya kesehatan.

Stunting bukan tidak mungkin dicegah. Terdapat beberapa hal yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan *stunting* selain dari kesadaran orang tua maupun keluarga. Peran pemerintah dalam hal ini amat diperlukan khususnya untuk daerah/provinsi yang memiliki angka prevalensi yang tinggi, diantaranya: **Pertama**, komitmen dari pimpinan negara untuk mengarahkan K/L terkait intervensi *stunting* baik di pusat maupun daerah, karena masalah *stunting* merupakan masalah yang multisektoral. **Kedua**, integrasi, sinkronisasi dan penguatan kerjasama antara program dan lintas sektor. **Ketiga**, sosialisasi serta edukasi terkait pentingnya kesadaran masyarakat terkait gizi, khususnya dampak kekurangan gizi dalam jangka panjang (*stunting*). **Keempat**, pembangunan akses pangan dan gizi serta infrastruktur air bersih dan sanitasi. Dengan intervensi yang tepat, resiko prevalensi *stunting* tentunya dapat dicegah, bahkan mereka yang memiliki riwayat kurang gizi di masa balita, tetap bisa dioptimalkan² sebagai modal Indonesia meraih bonus demografi. Karena ketidaksiapan semua pemangku kepentingan pembangunan dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut melalui pembangunan manusia yang baik akan membuat kita gagal memanfaatkan jendela peluang tersebut. Sejauh mana kita mempersiapkan pembangunan manusia dewasa ini akan menentukan sejauh mana kita akan berhasil memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut.

Daftar Pustaka

Adelia, Tita. 2017. 1 dari 3 Balita di Indonesia Derita Stunting. Diakses dari <https://katadata.co.id/infografika-indonesia-derita-stunting>. Tanggal akses 15 Januari 2018

Bappenas, BPS, UNPF. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Gizi Tinggi Prestasi. 2016. Deklarasi Mencegah Stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Diakses dari <http://gizitinggi.org/home/deklarasi-mencegah-stunting-di-kabupaten-ogan-komering-ilir-sumatera-selatan.html>. Tanggal akses 15 Januari 2018

Harian Nasional. 2017. 26 Persen Orang Kaya Menderita Stunting.

Diakses dari <http://harnas.co/2017/08/09/26-persen-orang-kaya-menderita-stunting>. Tanggal akses 18 Januari 2018

Kementerian Kesehatan. 2017. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016

Muqni, Asry Dwi. 2012. Yuk Cegah Stunting. Diakses dari <https://catatanseorangahligizi.wordpress.com/2012/06/28/yuk-cegah-stunting/>. Tanggal akses 16 Januari 2018

OECD. 2012. Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 Results in Focus

Purnasari, Galih. 2017. Strategi Pencegahan Stunting melalui Perbaikan Gizi Remaja: Best Practise di

2) Fokus terhadap periode 1000 Hari Pertama Kehamilan (HPK) tidak menghalangi kemungkinan upaya perbaikan gizi pada tahap sensitif lain di luar 1000 Hari Pertama Kehamilan (HPK). Pertumbuhan bersifat kompleks dan periode remaja memberikan kesempatan tambahan di dalam siklus kehidupan yang dapat memperbaiki *stunting* dan dapat memberikan efek positif bagi generasi seterusnya (Galih, Purnasari. 2017). Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Dr. dr. Damayanti R. Sjarif, Sp.A(K) bahwa, anak yang sudah terlanjur *stunting* ada harapan untuk dapat diperbaiki, yaitu pada saat masa pubertas.

Berbagai Negara

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)

Triananda, Kharina. 2015. Ini Cara Memperbaiki “Stunting” Pada Anak. Diakses dari <http://www.beritasatu.com/kesehatan/287796-ini-cara-memperbaiki-stunting-pada-anak.html>. Tanggal akses 17 Januari 2018

Ulum, Bahrul. 2017. Kurang Gizi

Rentan pada Gangguan Kecerdasan dan Penyakit. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/penaulum/5a1e0e14941c2062902869d2/kurang-gizi-rentan-pada-gangguan-kecerdasan-dan-penyakit>. Tanggal akses 17 Januari 2017

Worldbank. 2015. Beban Ganda Malnutrisi Bagi Indonesia. Diakses dari <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/04/23/the-double-burden-of-malnutrition-in-indonesia>. Tanggal akses 17 Januari 2018

Fenomena Dana Bansos dan Hibah Di Tahun Politik

oleh
Dwi Resti Pratiwi*)

Abstrak

Penyimpangan terhadap dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kerap terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dari temuan BPK terhadap penyimpangan kedua anggaran tersebut yang selalu terjadi hampir setiap tahun. Bahkan kedua anggaran ini kerap dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mempertahankan kekuasaannya menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dari anggaran dana bansos dan hibah yang meningkat menjelang pesta demokrasi tersebut. Oleh karenanya, perlu ada pencegahan dan tindakan tegas untuk memberantas aksi penyimpangan dana bansos dan hibah terutama menjelang pemilu dan pilkada.

Belanja bantuan sosial (bansos) adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (PMK RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga). Sedangkan belanja hibah yaitu setiap pengeluaran Pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya (PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kedua anggaran tersebut menarik untuk dibahas di tahun politik ini karena dibandingkan dengan anggaran lain, kedua anggaran tersebut rawan diselewengkan untuk kepentingan politik oleh para pejabat pusat maupun daerah. Tentunya pernyataan tersebut bukan hanya kabar angin belaka melainkan sudah terbukti oleh temuan-temuan dari hasil audit BPK yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran bansos dan hibah masih diliputi banyak penyimpangan di

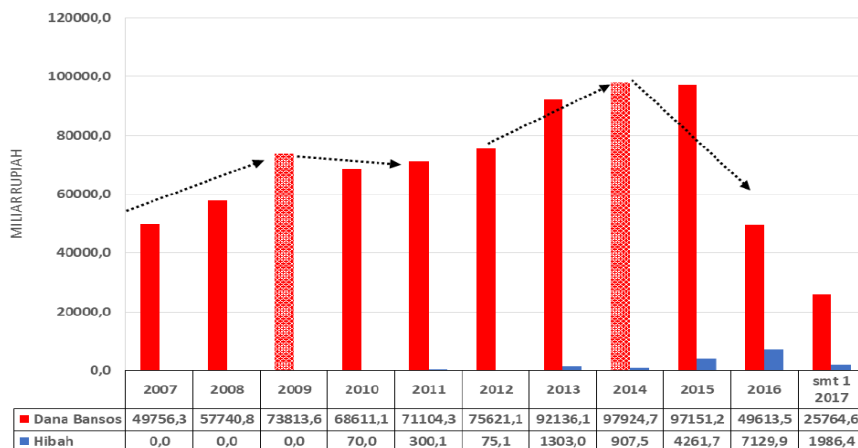
hampir setiap tahunnya. Selain itu, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga menyatakan bahwa di tingkat daerah dana bansos dan hibah tersebut rawan diselewengkan sebagai dana kampanye oleh calon petahana, sedangkan di beberapa kementerian/lembaga terdapat tren kedua dana tersebut diselewengkan oleh partai berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya (Sindonews.com 2013). Mengingat tahun 2019 ini akan dilaksanakan pemilihan umum serta di tahun 2018 akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) maka kedua anggaran tersebut perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih baik untuk mengurangi tingkat penyimpangan. Pada tulisan ini, penulis akan membahas temuan penyimpangan dana bansos dan hibah serta penggunaannya menjelang tahun-tahun politik.

Temuan Penyimpangan Terkait Dana Hibah dan Bansos

Pada bagian sebelumnya telah dibahas temuan BPK terkait penyimpangan dana bansos, maka pada bagian ini akan dibahas sebagian kecil temuan BPK tersebut. Diantaranya yaitu temuan BPK atas LKPP tahun 2013 yang mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) atas penyaluran dana bansos. Temuan tersebut yaitu penganggaran bansos

*)Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dwirestipratiwi@gmail.com

Gambar 1. Perkembangan Dana Bansos dan Hibah di Tingkat Pusat



Sumber : LKPP, BPK RI

yang tidak tepat, dana bansos kementerian/lembaga (K/L) yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan rekening penampungan K/L, bansos tidak sesuai sasaran dan tidak sesuai peruntukan, serta lemahnya pelaksanaan pertanggungjawaban bansos. Ternyata permasalahan tersebut telah diungkap juga dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2006, 2007, 2008, 2010, dan 2012. Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bansos pada tujuh K/L sebesar Rp15.580,7 miliar, diantaranya belanja bansos disalurkan kepada yang tidak berhak atau tidak tepat sasaran, penggunaan tidak sesuai peruntukan pada dua K/L, dan kekurangan volum pada dua K/L sebesar Rp2,7 miliar dan belanja bansos yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bansos sebesar Rp9.784,9 miliar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fenomena Dana Bansos dan Hibah di Tingkat Pusat Menjelang Pemilu

Temuan penyimpangan dana bansos oleh BPK di tiap tahun tersebut juga menunjukkan lemahnya bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban dalam anggaran ini. Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa realisasi

dana bansos dan hibah mengalami peningkatan sebesar 48,3 persen dari tahun 2007 ke 2009 yang merupakan tahun pemilihan umum. Selanjutnya, realisasi anggaran ini menurun sesuai masa Pemilu tersebut yaitu menjadi sebesar negatif 6,9 persen dari tahun 2009 ke 2010. Begitu juga yang terjadi pada Pemilu tahun 2014 dimana dana bansos dan hibah meningkat 30,5 persen dari tahun 2012 ke 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan dana bansos terutama mendekati tahun pemilu dan adanya peningkatan penyimpangan terhadap dana bansos dan hibah. Sementara itu, di tahun 2016 dapat dilihat anggaran bansos dan hibah turun secara drastis yaitu 44 persen. Hal ini menjadi salah satu perhatian pemerintahan Jokowi untuk membenahi dana hibah yaitu dengan mengubah penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai. Hal ini diklaim oleh Menteri Sosial bahwa program ini efektif untuk meminimalisir penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (Suara.com 2017).

Pada tahun 2018 ini, pemerintah menyatakan bahwa APBN fokus pada penurunan angka kemiskinan dan penanganan kesenjangan sosial sehingga program bantuan sosial menjadi andalan pemerintah. Kebijakan anggaran bantuan sosial dikelola oleh beberapa kementerian saja. Salah satu diantaranya yaitu Kementerian Sosial,

hal ini berdampak pada kenaikan anggaran Kementerian Sosial sebesar 138,4 persen dari Rp17,3 triliun dalam APBNP 2017 menjadi Rp41,29 triliun dalam APBN 2018. Namun yang perlu menjadi perhatian ialah kenaikan program penanganan fakir miskin meningkat sangat tajam yaitu dari Rp2,14 triliun menjadi Rp21,45 triliun dalam APBN 2018 atau meningkat sebesar 902,34 persen (Nota Keuangan 2018). Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial menjelaskan bahwa kenaikan anggaran perlindungan jaminan sosial dikarenakan jumlah Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dari 6 juta keluarga miskin menjadi 10 juta keluarga miskin (Katadata, 2017).

Temuan Penyimpangan Terkait Dana Hibah dan Bansos di Tingkat Daerah

Tidak hanya di pusat saja, penyimpangan dana bansos sangat rawan terjadi di tingkat daerah. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa beberapa pejabat dan kepala daerah masuk penjara karena terjerat kasus dana bansos. KPK juga menemukan bahwa momentum pemilihan kepala daerah kerap dijadikan ajang korupsi dana bansos dan hibah (Rappler, 2015). Contoh penyimpangan dana bansos dan hibah di tingkat daerah yaitu berdasarkan hasil kajian investigasi FITRA terhadap audit BPK ditemukan potensi korupsi pada APBD Provinsi Banten 2014-2015 sebesar Rp378 Miliar (Media Indonesia, 2016). Kasus dana hibah juga menjerat Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho. Dimana atas kasusnya tersebut Gatot dituntut delapan tahun penjara atas dugaan kasus korupsi dana hibah dan bansos tahun 2013 senilai Rp4,034 miliar. Di Sumatera Selatan ditemukan dugaan kasus korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD 2013 dimana penyidik menduga ada keterlibatan eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi mengatur dana hibah ini untuk kepentingan tertentu (Tirto.id, 2017).

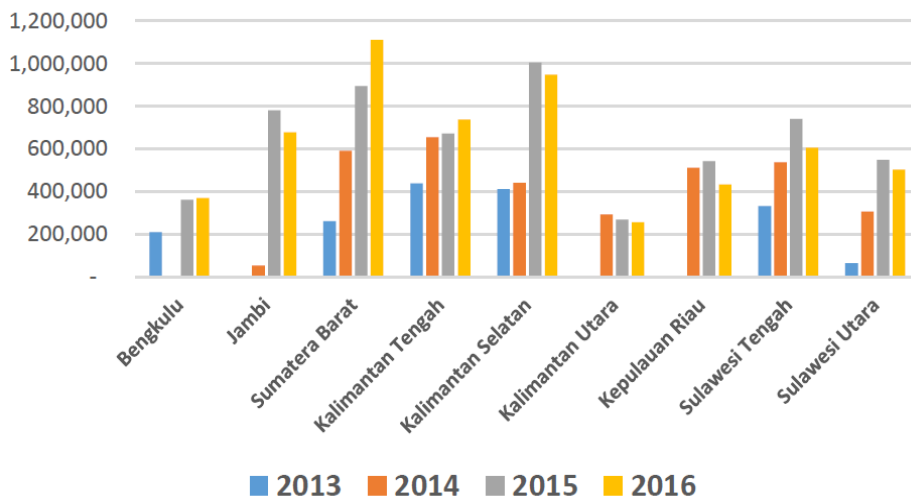
Atas temuan penyalahgunaan dana

bansos yang terjadi berulang kali di daerah maka Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengeluarkan surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri. Dimana surat tersebut berisi permintaan kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Namun sepertinya dana bansos dan hibah tersebut masih berpotensi untuk diselewengkan demi kepentingan memperoleh kekuasaan.

Dinamika Penggunaan Dana Hibah dan Bansos di Tingkat Daerah Menjelang Pilkada

Pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 menarik untuk dilihat bagaimana pergerakan realisasi dana bansos dan hibah menjelang dan setelah pilkada. Pilkada tersebut melibatkan 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Tulisan ini akan mengambil contoh pelaksanaan alokasi dana bansos di tingkat provinsi menjelang dan setelah pilkada 2015. Secara umum dalam gambar 2 terlihat bahwa terjadi kenaikan realisasi dana bansos dan hibah dari tahun 2013 hingga 2015. Total realisasi dana bansos dan hibah pada 9 provinsi tersebut sebesar Rp1.715,8 miliar pada tahun 2013, meningkat menjadi Rp3.389,5 miliar pada tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2015 menjadi Rp5.813,6 miliar atau meningkat sebesar 239 persen dibandingkan tahun 2013. Sementara, di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp5.640,3 miliar. Dilihat dari tiap provinsinya, terjadi kenaikan dana bansos dan hibah yang sangat signifikan pada provinsi Jambi yang awalnya tidak dialokasikan dana hibah dan bansos di tahun 2013 namun pada tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp781 miliar. Selain itu kenaikan dana bansos dan hibah juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 244 persen dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 748 persen dari tahun 2013 ke 2015. Dimana ketiga Gubernur di provinsi

Gambar 2. Realisasi Dana Bansos dan Hibah Tahun 2013 – 2016 di Tingkat Provinsi Pelaksana Pilkada Tahun 2015 (dalam juta rupiah)



Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan

tersebut berstatus petahana dalam ajang pilkada 2015.

Pada pilkada serentak tahun 2018 mendatang ini juga dicurigai adanya pemanfaatan dana hibah dan bansos untuk kepentingan politik. Koordinator Investigasi *Center for Budget Analysis* (CBA) mengatakan bahwa anggaran hibah/bansos tahun 2017 di 154 kota/kabupaten sebesar Rp6.390,8 miliar.

Besaran anggaran ini tidak diimbangi dengan serapan anggaran maksimal. Hal itu terlihat dari capaian serapan anggaran pada semester I tahun 2017 yang cukup rendah. Pemerintah daerah terkesan sengaja menggenjot sisa anggaran bansos dan hibah di tiga bulan terakhir. Selanjutnya, Ditjen Keuangan Daerah mengatakan telah terjadi kenaikan dana bansos/hibah

Tabel 1. Realisasi Semester 1 Tahun 2017 dan Kenaikan Dana Bansos dan Hibah dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 pada Provinsi Pelaksana Pilkada 2018

PROVINSI	Realisasi Smt I 2017		Kenaikan Anggaran 2016 ke 2017		Ket.
	Bansos	Hibah	Bansos	Hibah	
Sumatera Utara	-	40%	-	21,50%	Gub dan Wagub Tidak Ikut Pilkada 2018
Sulawesi Tenggara	-	37,80%	-	22,10%	
Kalimantan Barat	48,60%	60,30%	75,60%	-18,10%	
Kalimantan Timur	0%	39,10%	44,80%	2,70%	Wagub saat ini calon wagub Pilkada 2018
Bali	11,20%	38,50%	-91,90%	-3,90%	
NTB	10,40%	57,10%	-81,70%	-18,90%	
NTT	15,80%	49%	113,40%	-8,40%	Wagub/Kel. Gub Maju Pilkada 2018
Sumatera Selatan	16,70%	60,40%	165,20%	-19%	
Jawa Barat	0%	48,50%	284,80%	3,20%	
Jawa Timur	29,80%	47,80%	-39,20%	-13,50%	Petahana
Sulawesi Selatan	49,90%	38,40%	100%	-0,10%	
Riau	0,50%	60%	45,60%	-31,30%	
Lampung	58,30%	46,80%	131,90%	3,90%	
Jawa Tengah	0%	53%	580,40%	-5,80%	
Maluku	-	45,70%	100%	-15,60%	
Maluku Utara	32,70%	43,40%	8,30%	-16,90%	
Papua	75,20%	38,80%	-37,20%	1,10%	

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan

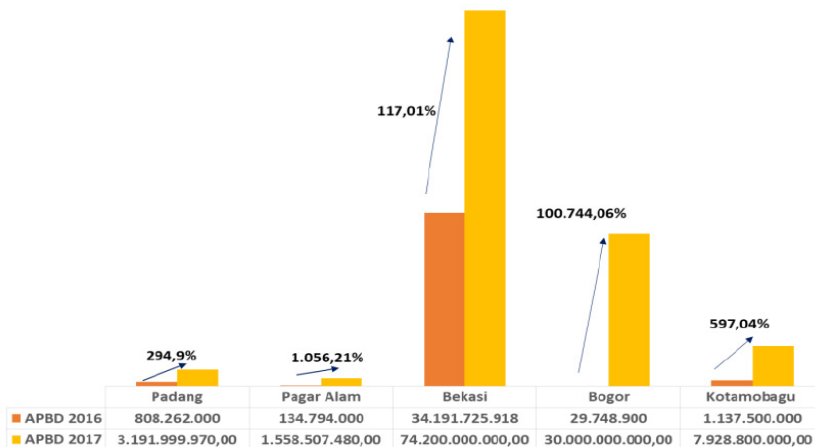
yang berlebihan di beberapa daerah (Koransindo, 2018). Berdasarkan kecurigaan tersebut, penulis mencoba menampilkan data realisasi semester I tahun 2017 dan kenaikan anggaran dana bansos dan hibah dari tahun 2016 ke 2017.

Pada tabel 1 terlihat bahwa Gubernur yang tidak maju dalam bursa pilkada tahun 2018 mendatang seperti Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan dana bansos dalam APBN 2017. Realisasi semester I tahun 2017 Provinsi Jawa Barat untuk dana bansos sebesar 0 persen, sementara kenaikan anggarannya mencapai 284,8 persen dari tahun 2016 ke tahun 2017. Selanjutnya bagi para petahana seperti yang terjadi di Provinsi Riau, anggaran dana bansos tahun 2017 meningkat sebesar 45,6 persen sementara

realisasi semester I anggaran dana bansos tahun 2017 hanya sebesar 0,5 persen. Bahkan anggaran dana bansos di Jawa Tengah dari tahun 2016 ke 2017 meningkat sebesar 580,4 persen, sementara dalam laporan realisasi semester I tahun 2017 tercatat belum teralokasikan sama sekali.

Berdasarkan beberapa sampel kota yang melaksanakan pilkada tahun 2018 mendatang terlihat beberapa Walikota petahana meningkatkan anggaran dana bansos yang sangat signifikan dari APBD 2016 ke 2017. Terlihat pada gambar 3 bahwa Padang meningkatkan anggaran bansosnya dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 294,9 persen, Bekasi 117 persen, Kotamobagu 594 persen, Pagar Alam 1.056 persen bahkan Kota Bogor meningkatkan anggarannya sebesar 100.744 persen (gambar 3).

Gambar 3. Kenaikan Anggaran Bantuan Sosial dari APBD 2016 ke 2017 di Beberapa Kota Pelaksana Pilkada 2018



Sumber: Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi Untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2016

Rekomendasi

Rawannya penyalahgunaan dana bansos dan hibah tidak terlepas dari belum adanya regulasi yang mengatur secara kuat terkait pelaksanaan dana bansos dan hibah tersebut. Hingga saat ini kedua anggaran tersebut diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). PMK hanya mengatur hal teknis terkait dana hibah, namun terkait pelaksanaannya di lapangan dikembalikan lagi pada kebijakan masing-masing kementerian. Sementara Permendagri juga belum cukup kuat disebabkan oleh tingkat kepatuhan di daerah masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang

tata laksana dana bansos dan hibah yang lebih ketat terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pertanggungjawaban dan sanksi terhadap penyelewengan dana tersebut. Terkait pencegahan penyelewengan dana hibah dan bansos menjelang pemilu dan pilkada, sebaiknya perlu diterapkan kebijakan moratorium kedua anggaran tersebut menjelang pemilu dan pilkada. Kebijakan lain dapat berupa pemberian batasan kenaikan anggaran bansos dan hibah, seperti tidak lebih dari 10 persen dan dapat dikecualikan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti bencana, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk memberikan efek jera maka semua kasus korupsi dana bansos dan hibah harus segera diproses hingga ke pengadilan. Oleh karena itu, para penegak hukum terutama KPK perlu menindaklanjuti secara tegas temuan BPK terkait penyimpangan anggaran bansos dan hibah baik di pusat maupun daerah.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2007 – 2016

CNN Indonesia. 5 November 2014. “Jokowi Harus Buat Aturan Cegah Korupsi Bansos”. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141105080349-12-9732/jokowi-harus-buat-aturan-cegah-korupsi-bansos>. Tanggal akses 15 Januari 2018

Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran 2013 – 2106, APBD 2017, Laporan Realisasi Anggaran Daerah Semester I Tahun 2017

Katadata. 16 Agustus 2017. RAPBN 2018 Jokowi Perbesar Dana Bantuan Sosial dan Subsidi”. Diakses dari <https://katadata.co.id/>

[berita/2017/08/16/rapbn-2018-jokowi-perbesar-dana-bantuan-sosial-dan-subsidi](https://www.koransindo.com/page/news/2018-01-05/07/Dana_Hibah_Bansos_Rentan_Dikapitalisasi). Tanggal akses 16 Januari 2018

Kementerian Keuangan. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksana APBN Semester Pertama TA 2017 dan Nota Keuangan 2018

Koransindo. 5 Januari 2018. Dana Hibah-Bansos Rentan Dikapitalisasi. Diakses dari http://koran-sindo.com/page/news/2018-01-05/07/Dana_Hibah_Bansos_Rentan_Dikapitalisasi. Tanggal akses 6 Januari 2018

Media Indonesia. 8 Mei 2016. “KPK Diminta Usut Dugaan Dana Hibah dan Bansos Banten”. Diakses dari <http://mediaindonesia.com/news/read/44245/kpk-diminta-usut-dugaan-korupsi-dana-hibah-dan-bansos-banten/2016-05-08>. Tanggal akses 12 Januari 2018

*“Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006